FAQ: KATEGORI UMUM

1. Apa itu Fintech?

Fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik, antara lain pembayaran (payment), pendanaan (funding) seperti pinjam-meminjam, perbankan (digital banking), Pasar Modal (capital market), perasuransian (insurtech), jasa pendukung (supporting fintech); dan lainnya (inovasi keuangan digital).

2. Apa itu Fintech Lending atau Fintech Peer-to-Peer Lending?

Fintech Lending atau disebut juga Fintech Peer-to-Peer Lending (Lending) atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) adalah salah satu inovasi pada sektor jasa keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Mekanisme transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh Penyelenggara Fintech Lending, baik melalui aplikasi maupun laman website.

3. Apa beda Fintech dengan Fintech Lending?

Fintech bersifat umum dan tidak terbatas pada satu industri jasa keuangan tertentu. Fintech Lending/Lending terbatas pada inovasi jasa keuangan pada transaksi pinjam meminjam saja.

4. Siapa Penyelenggara Fintech Lending?

Penyelenggara Fintech Lending dapat berupa suatu badan hukum atau koperasi yang memiliki sistem untuk melaksanakan mekanisme transaksi pinjam meminjam secara online, baik melalui aplikasi maupun laman website.

5. Bagaimana cara kerja Fintech Lending?

Penyelenggara Fintech Lending hanya berperan sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pemberi pinjaman dan penerima pinjaman terlebih dahulu harus melakukan registrasi dan mengisi data diri yang diperlukan sebelum dapat mengajukan pemberian pinjaman ataupun permohonan pinjaman.

6. Apakah ada peraturan terkait Lending?

Peraturan terkait Lending tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

7. Apa saja yang diatur dalam POJK 77/2016?

Ketentuan Umum, Penyelenggaraan, Pengguna Jasa LPMUBTI, Perjanjian, Mitigasi Risiko, Tata Kelola Sistem TI, Edukasi dan Perlindungan Pengguna LPMUBTI, Tanda Tangan Elektronik, Prinsip dan Teknis Pengenalan Nasabah, Larangan, Laporan Berkala, Sanksi, Ketentuan Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

8. Apakah Fintech Lending harus terdaftar atau berizin?

Penyelenggara Fintech Lending harus mendapatkan tanda terdaftar sebelum menjalankan kegiatan operasionalnya. Maksimal 1 (satu) tahun setelah mendapatkan tanda terdaftar, Penyelenggara wajib mengajukan permohonan perizinan ke OJK.

9. Apakah perbedaan Penyelenggara Fintech Lending terdaftar dengan berizin?

Keduanya dapat menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelenggara terdaftar dapat menjalankan kegiatan operasional hingga 1 (satu) tahun setelah mendapat tanda terdaftar dan selanjutnya wajib mengajukan

permohonan perizinan, apabila tidak mengajukan permohonan perizinan maka Penyelenggara terdaftar harus mengembalikan tanda terdaftarnya kepada OJK. Sementara Penyelenggara berizin tidak memiliki masa kadaluwarsa atas tanda berizin yang dimilikinya.

10. Apakah ada Fintech ilegal?

Fintech ilegal adalah fintech yang telah menyelenggarakan kegiatan usahanya namun belum terdaftar/berizin dari regulator yang berwenang.

Salah satu risiko terbesar bagi masyarakat dengan adanya Fintech ilegal adalah penyalahgunaan data pribadi digital, dimana Fintech ilegal akan mengakses dan mengambil seluruh data pribadi digital Pengguna yang berada di dalam handphone diantaranya daftar kontak, riwayat kontak, galeri, foto, dan sms.

Atas akses dan perolehan data tersebut, data pribadi digital yang diperoleh Fintech ilegal banyak disalahgunakan, umumnya dalam banyak kasus penagihan dimana data pribadi Pengguna digunakan untuk (i) menyebarkan atau menviralkan berbagai informasi negatif Pengguna kepada seluruh daftar kontak yang ada di handphone Pengguna dan/atau (ii) melakukan penagihan kepada seluruh pihak yang ada dalam daftar kontak tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam menanggulangi Fintech ilegal, OJK telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI) dan Satgas Waspada Investasi (SWI). Hingga pertengahan Maret 2019 sudah terdapat 803 fintech ilegal yang telah diblokir oleh SWI.